

# **SISTEM DAN PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT KONSUMTIF PADA PT.BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk CABANG SAMARINDA**

Oleh :

Yulistina Meilinda, LCA. Robin Jonathan, Heriyanto

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

## **ABSTRACT**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem dan prosedur pemberian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Samarinda. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan pihak manajemen PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Samarinda dalam mengambil keputusan dan meningkatkan pelayanan dalam pemberian kredit.

Permasalahan penelitian ini yaitu apakah sistem dan prosedur dalam pemberian kredit sudah optimal dan sudah sesuai dengan surat edaran yang telah berlaku mengenai tata cara dan ketentuan dalam pemberian kredit. Dari hipotesis diduga sistem dan prosedur yang dijalankan belumlah optimal.

Pengumpulan data dilakukan selama sebulan. Dalam sebulan itu dilakukan dari hari senin sampai dengan hari jumat. Dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif Komparatif (Perbandingan)*, yaitu membandingkan antara sistem pemberian kredit konsumtif yang dilaksanakan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Samarinda dengan surat edaran direksi tentang petunjuk pelaksanaan kredit konsumtif yang telah ditetapkan.

Kata Kunci : Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit

## **I. PENDAHULUAN**

Dalam menjalankan kegiatannya, selain menarik dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan, deposito, giro serta jasa - jasa bank lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian jasa kredit kepada masyarakat.

Pemberian jasa kredit yang diberikan kepada masyarakat selalu disertai dengan bunga yang sesuai dengan jumlah kredit yang diberikan, dan harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yakni pihak bank selaku yang memberikan

pinjaman dengan pihak nasabah selaku yang diberikan pinjaman.

Dalam pemberian kredit ini, bank harus dapat menanggung resiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu sebelum kredit diberikan, untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit ini mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang di berikan serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank benar-benar yakin bahwa kredit yang diberikan aman.

Dari berbagai jenis produk kredit konsumtif yang ditawarkan oleh PT.Bank Rakyat Indonesia, terutama kredit Briguna Purna dan Briguna Karya terdapat beberapa permasalahan yang dikarenakan dalam proses pemberian kredit tidak sesuai dengan pedoman dari PT.Bank Rakyat Indonesia kantor pusat. Karena adanya kebijakan dan pedoman yang ditetapkan timbulnya resiko kredit macet yang lebih besar. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka dari hasil penelitian dan data-data yang dikumpulkan dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Samarinda, penulis mencoba mengangkatnya dalam penulisan skripsi ini yaitu dengan judul : “ Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Samarinda.”

## II. DASAR TEORI

Berdasarkan pada uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penulisan ini adalah: “Apakah sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif tepatnya pada kredit Briguna Karya dan Briguna Purna yang dijalankan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Samarinda telah sesuai dengan pedoman atau petunjuk pelaksanaan pemberian kredit konsumtif yang telah ditetapkan”

Menurut Mulyadi (2001:2), mengemukakan pengertian sistem sebagai berikut: “Sistem adalah kumpulan unsur-unsur yang merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan saling berkerjasama untuk mencapai tujuan sistem dimana suatu sistem tersebut merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar.”

Penjabaran definisi-definisi tersebut diatas hanya menjelaskan mengenai pengertian sistem sedangkan prosedur akan dipaparkan sebagai berikut:

Sedangkan menurut Mulyadi (2001:5) definisi prosedur adalah: “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Al.Haryono Jusup (2001:10) mendefinisikan akuntansi dari dua sudut pandang, yaitu di tinjau dari sudut pemakainya: “Akuntansi adalah merupakan suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi.”

Dari sudut pandang suatu proses kegiatan Akuntansi didefinisikan sebagai: “Proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi.”

Menurut Mulyadi (2001:11) Sistem Akuntansi didefinisikan sebagai berikut: “Sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan.”

Menurut Undang-undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998, yang dikutip oleh Kasmir (2002:92) : “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan

masalah sangsi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

Menurut Mulyadi (2001:25) mendefinisikan sistem pengendalian intern sebagai berikut: "Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan urutan yang dikordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan kendala data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen."

## II. METODE PENELITIAN

Kredit konsumtif adalah merupakan kredit yang diberikan oleh Bank untuk memenuhi keperluan secara konsumtif seperti pembelian rumah, renovasi, beli mobil atau motor dan juga keperluan konsumtif lainnya berupa biaya pendidikan dan lain-lain.

Alat analisis yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis menggunakan teknik dan alat analisis metode perbandingan (*comparability*) dengan cara membandingkan unsur-unsur pengendalian interen tersebut, yaitu membandingkan antara sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif Briguna Karya dan kredit Briguna Purna yang dilaksanakan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Samarinda dengan Surat Edaran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) kantor pusat. Dan apakah sistem perhitungan bunga yang diberikan sama dengan ketentuan yang ada.

## III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil analisa yang telah dilakukan, terlihat bahwa masih ada terdapat sistem dan prosedur yang tidak sesuai dengan sistem dan prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor pusat.

Diantaranya dalam hal pemberian kredit Briguna Purna yang mana sesuai dengan surat edaran dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor pusat bahwa seharusnya kredit Briguna Purna diberikan kepada pegawai instansi/perusahaan yang ada Perjanjian Kerjasama dengan BRI, sehingga dalam hal pembayaran kredit dilakukan dengan cara pemotongan gaji langsung masuk melalui BRI ataupun melalui bendahara atau juru bayar yang sudah ditentukan oleh instansi atau perusahaan tersebut, sehingga tidak ada pembayaran yang dilakukan sendiri oleh nasabah tersebut karena pembayaran harusnya dilakukan secara kolektif tiap bulannya demi untuk menghindari resiko kredit macet yang lebih besar. Akan tetapi yang terlihat bahwa tiap bulan masih terdapat pembayaran angsuran pinjaman yang dilakukan sendiri oleh nasabah tanpa melalui juru bayar atau bendahara gaji.

Bila NPL atau kredit macet Briguna pada posisi akhir bulan mencapai lebih dari 3%, maka pada bulan berikutnya, Kanca/KCP/BRI unit tidak diizinkan untuk melayani kredit Briguna kepada debitur baru pegawai instansi/perusahaan tersebut. Khusus untuk debitur lama kredit Briguna dengan *track record* baik (tidak pernah menunggak pokok dan bunga), dimungkinkan diberikan fasilitas kredit Briguna dengan memperhatikan *Repayment Capacity (RPC)* debitur. Ketentuan tersebut merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, dimana pada level NPL lebih dari 3%, Pemimpin Wilayah (Pinwil) dan Pinca harus bertanggung jawab secara langsung terhadap kebijakan ekspansi kredit Briguna, khususnya untuk debitur baru dan atau instansi/perusahaan baru.

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis serta perhitungan mengenai pemberian kredit

dapat disimpulkan bahwa sistem dan prosedur pemberian kredit konsumtif sudah optimal sesuai dengan surat edaran, namun masih ada beberapa hal masih harus diperhatikan untuk peningkatan pemberian kredit.

Misalnya dalam hal pemberian kredit briguna alangkah lebih baik nasabah tersebut pembayaran gajinya sudah melalui BRI (Payroll), sehingga memudahkan petugas untuk memotong gaji tiap bulannya untuk pembayaran angsuran. Hal tersebut diperlukan untuk mengurangi kredit bermasalah.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

Jusup, Al Haryono, 2001, Dasar-Dasar Akuntansi, Jilid I, Edisi 6, STIE YKPN, Yogyakarta

Kroenke, David dan Richard Hatch, 2001, Management Information Sistem, Sixth Edition, MC.Grow-Hill.Inc, Nort Amerika

Kasmir, 2002, Bank & Lembaga Keuangan, Raja Grafindo, Jakarta

Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Jilid I, Edisi 3, Cetakan ketiga, Salemba Empat, Yogyakarta

Narko, 2000, Sisem Akuntansi, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta

Pyle, William.W, dan Kermit, 1996, Financial Accounting Principles 3

Rollin, Nisworger, C Philiphe, Fees, dan Carl S Warren, 1999, Prinsip-prinsip Akuntansi, Jilid 1, Edisi Keenam Belas, Erlangga, Jakarta.